

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kesejahteraan sosial. Sejahtera adalah tenram, selamat sentosa, senang. Jadi bisa di ambil kesimpulan kesejahteraan itu berkaitan dengan keadaan baik, kondisi manusia- manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan damai dan sehat. Dari berbagai pengertian kesejahteraan sosial maka orang yang tidak sejahtera adalah kebalikan dri pengertian di atas, kondisi tidak tentram, tidak aman, keadaan tidak makmur. Keadaan tidak makmur bisa di sebut dengan kemiskinan. Kemiskinan yaitu salah satu masalah sosial yang paling diketahui oleh masyarakat.

Kemiskinan adalah hal menjadi permasalahan yang sangat besar di Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang menjadikan masalah rumit sehngga beberapa negara tdak mempunyai kemampuan untuk menghilangkan seluruh kemiskinan di negerinya. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di keadaan miskin yang membuat mereka tidak mampu dalam menghidupi kebutuhan sehari- hari.

Kemiskinan tidak hanya memiliki akibat pada tidak tercukupinya atau tepenuhinya kebutuhan dasar, akan tetapi mengakibatkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar hidup rata rata seperti kualitas hidup, pendidikan, gizi, kesehatan anak, dan sumber air bersih. Kemiskinan memang harus ditangani dengan serius.

Kemiskinan sudah seharusnya dilakukan penanganannya secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan pemerintah adalah kebijakan, program, dan tindakan yang dilaksanakan bagi masyarakat, keluarga, dan kelompok masyarakat, dengan atau tanpa mata pencaharian, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan riil keluarganya. (Hasimi, 2020)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) proporsi penduduk miskin perkotaan sebesar 7,50 persen pada Maret 2022 dan meningkat menjadi 7,53 persen pada September 2022. Proporsi penduduk miskin pedesaan sebesar 12,29 persen pada Maret 2022 dan 12,36 persen pada September 2022. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat 0,16 juta orang pada September 2022 (dari 11,82 juta pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta pada September 2022). Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebesar 0,04 juta orang selama periode yang sama (dari 14,34 juta pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta pada September 2022).

Menurut BPS, dari segi ekonomi, kemiskinan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bukan makanan melalui penerapan pendekatan kebutuhan dasar. Kecukupan gizi minimum ditentukan sebagai jumlah pendapatan yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan energi minimal 2100 kalori per orang dalam 4 hari. Penanggulangan Kemiskinan Batas kecukupan barang bukan makanan dihitung dari kebutuhan sehari-hari yang diberikan sebagai kebutuhan minimum, mis. seperti perumahan, sandang, kesejahteraan, pendidikan, transportasi dll. (Hermawati and Winarno 2020)

Salah satu masalah dari kemiskinan yaitu tentang kekurangan pangan. Pangan adalah kebutuhan sangat mendasar manusia yang harus dipenuhi agar hidup terus berjalan. Kebutuhan pangan bisa terpenuhi karena ada ketersediaan dan kemudahan akses untuk memperoleh pangan. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terpenuhinya kebutuhan pangan.

Pengelolaan dan pengendalian kebiasaan konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan rakyat, pemerintah juga harus menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan, kebutuhan pangan seluruh rakyat harus cukup, terjangkau, dan terdistribusi dengan baik.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. (Dini et al., 2018)

Pemerintah pada umumnya berusaha meningkatkan sebesar besarnya dalam bidang kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pangan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya pasti dilakukan pemerintah dengan

memberikan subsidi seperti pemberian beberapa program salah satunya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibuat untuk lebih tepat sasaran, menyalurkan bantuan sembako dalam jumlah yang tepat dan tepat waktu yang sebelumnya diberikan melalui program Raskin. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai adalah untuk meningkatkan penargetan, memberikan nutrisi seimbang, lebih banyak pilihan dan kontrol bagi yang kurang beruntung atau miskin, mendorong bisnis akar rumput atau UKM, dan memberikan layanan keuangan kepada yang kurang beruntung atau miskin. Rakyat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial pemerintah untuk keluarga yang membutuhkan pangan. Makanan dalam program ini antara lain nasi, protein hewani, sayuran, buah-buahan dan telur.

Program yang akan dilaksanakan harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Berhasil atau tidaknya suatu program pemerintah dapat dinilai dari tercapai atau tidaknya tujuan program tersebut. Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang efisien melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan tercapai. (Rosaliana & Hardjati, 2019)

Kelurahan campaka adalah salah satu kelurahan yang ada di kota bandung yang melaksakan atau mengikuti program bantuan pangan non tunai. Pelaksanaan program bantuan pangan nontunai di keluarahan campaka ini sudah ada sejak lama. Dengan adanya program bantuan pangan non tunai ini bisa membantu masyarakat, jika berjalan dengan baik program ini pasti akan dapat membantu mengurangi

pengeluaran pangan. Penyaluran program ini sangat penting jadi harus diketahui proses penyaluran program bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan deskripsi di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung. Ada beberapa penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian ini yaitu :

1	Judul	Penulis	Hasil penelitian
1.	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kucanji Kota Padang	M Hidayat Panuntun Muslim	Implementasi Program BPNT dapat di katakan belum sesuai dengan SOP yang ada dikarena ada beberapa masyarakat yang masih tidak memahami program BPNT. Hal ini Dapat ditinjau dari komunikasi antara pihak Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan sangat baik maka ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan

			yang akan dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal.
2.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER	Kuni Nabila , Pudjo Suharso , Wiwin Hartanto	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bisa dikatakan masih belum sesuai dengan buku pedoman BPNT tahun 2018. Pada saat proses sosialisasi informasi yang telah diberikan kepada masyarakat kurang jelas, bahasa yang sulit dimengerti yang digunakan pada saat memberikan informasi akibatnya terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kurang mengetahui

			program BPNT mulai dari jumlah dan jenis bantuan yang didapatkan setiap bulannya
3.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI	Pebi Julianto	Ketepatan sasaran mengenai penyaluran program BPNT sudah cukup tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah, yang mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda.
4.	IMPLEMENTASI PROGRAM	Agus Wiyaka , Endang Murti	Sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

	BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KECAMATAN GERIH DAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018		menyatakan kepuasannya pada proses pelaksanaannya sedangkan pengelola E- warong juga menyatakan puas terhadap pelaksanaan program BPNT. Dari penelitian menunjukkan bahwa KPM dan E-warong sama-sama merasakan bahwa kegiatan Program BPNT tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi sangat mudah dimengerti serta nyaman, sehingga baik KPM maupun E-warong merasakan manfaatnya secara positif dari pelaksanaan BPNT.
5.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non	Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, Ismail Rachman	Komunikasi yang terjadi didalam implementasi kebijakan program

	Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore		Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan tosa dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang prosedur pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
6.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO	Eko Yudianto Yunus	Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn adalah ukuran dan tujuan

			<p>kebijakan juga menjelaskan implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasannya kebijakan itu dibuat. Akan tetapi Masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja jika bantuan tersebut mendapatkan bantuan berupa bahan pangan. Sedangkan pada tujuan sudah tertera bahwa ada beberapa tujuan pemerintah dalam program ini. Tujuan program Bantuan Pangan ini belum berjalan dengan semestinya karena ada salah satu</p>
--	--	--	---

			tujuan yaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
7.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA KAJARHARJO KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI	Nunung ifanatul mustafida	Implementasi program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya agen Ewarung penyalur yang menyebabkan antrian.
8.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TEMBONG KECAMATAN	Anggita Nurafia , Rina Yulianti , Arenawati	Instansi atau lembaga terkait sudah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

	CIPOCOK JAYA		<p>melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat, memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan</p>
9.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)	ASPAR, SAKARUDDIN M,SYAKHRUDDIN DN	<p>langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan non tunai yang dirasakan</p>

	<p>TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR</p>	<p>sangat membantu oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) guna memenuhi kebutuhan dasar pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya kemudian adalah bantuan tersebut, dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam jangka waktu perbulannya serta adanya berbagai hambatan-hambatan lainnya. Adapun hambatan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri</p>
--	---	---

			<p>meliputi: a) Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan pangan ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat); b) Jarak yang jauh antara e-warung dan kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat); c) Adanya Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya; d) Adanya permasalahan kartu rusak, kartu patah, atau terblokir/error, dan atau kartu hilang; e) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak melakukan pelaporan alamat saat pindah rumah (domisili) atau meninggal dunia.</p>
10.	IMPLEMENTASI PROGRAM	Nadya Rindayu Farista Fanny	setiap bulannya KPM menerima BPNT melalui

	<p>BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN</p>	<p>rekening Kartu Kombo yang terakumulasi sebesar Rp.200.000 dan dapat digunakan untuk membeli sejumlah komoditi yang telah tersedia. Kebutuhan pangan KPM Kecamatan Bancar menjadi tercukupi dan telah mengurangi pengeluaran untuk membeli sembako. Pemberian yang selalu tepat sasaran, yakni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tepat waktu dalam penyaluran bantuan, tepat jumlah sembako yang diberikan, tepat kualitas sembako yang diterima, tepat harga untuk transaksi pembelian sembako, serta tepat administrasi dalam</p>
--	--	--

			pengolahan data penerima BPNT menjadikan tujuan dari BPNT dapat tercapai
11.	implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu	Feny Sahara, Faizal Anwar, Titi Darmi	Dari segi Komunikasi Antar Organisasi yang dilakukan oleh pelaksana yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kabupaten Muara Bangkahulu sudah terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana dalam proses implementasi kebijakan BPNT oleh e-Warong di kabupaten Muara Bangkahulu dalam memberikan pelayanan KPM sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini.
12.	IMPLEMENTASI PROGRAM	Ozi Hernanda Putra , M. Nursi , Darwianis	Adanya anggapan ketidaktepatan waktu

	<p>BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KENAGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN</p>		<p>penyaluran Program BPNT di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman adalah tidak benar karena sudah dikatakan untuk jadwal penyaluran disesuaikan pada aturan yang telah diberikan pusat dan hal tersebut tidak bisa diganggu gugat, hanya saja adanya anggapan dari pihak Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat karena diakhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 penyaluran dilakukan 1 kali dalam 2 bulan bahkan ada yang 1 kali dalam 3 bulan namun untuk pengisian saldo tetap 1 kali sebulan masuk di rekening KKS masyarakat</p>
--	--	--	--

			Keluarga Penerima Manfaat.
13.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN	Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, H.Muhammad Uhaib As'ad.	Dalam pendistribusian program BPNT melalui e-warung sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dari program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu warga miskin yang ada dikelurahan alalak selatan. walaupun masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk melaksanakan program BPNT melalui e-warung yaitu Yang pertama faktor sumber daya manusia,

			sumber daya anggaran, dan sikap dari pengelola program.
14.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	Syeni Rakhmadani, Yuditya Wardhana, Ari Gusnita	Implementasi BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana belum berjalan dengan baik. Terlihat dari (a) Karakteristik masalah yang dilihat tingkat kesulitan teknis dari implementasi penyaluran Kebijakan BPNT terdapat sedikit kendala yaitu ketidakvalidtan data yang terdaftar pada Data Tepadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Republik Indonesia tercatat sebanyak 221 KPM namun yang berhasil menerima manfaat hanya sebanyak 182 KPM dan 39 data yang

			<p>tidak valid (b)</p> <p>Karakteristik Program/Kebijakan, dilihat dari kejelasan isi dari kebijakan Program BPNT sudah jelas yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).</p>
15.	<p>IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA</p>	<p>IMAL ALIMAH AKMAL</p>	<p>Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan</p>

	DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA		waktu yang sudah sepenuhnya tercapai walaupun belum maksimal.
16.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON- TUNAI (BPNT) MELALUI E- WARONG DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI	Herdiawan Waryadi dan Nanon Hanriana	Pertama, faktor perilaku pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. Kedua, faktor hubungan kerja antar pegawai dalam kaitan dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. Ketiga, faktor komunikasi pegawai dalam kaitan dalam kaitan

			<p>dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. Keempat, factor kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitan dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik.</p>
17.	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENANGGULANGI</p>	Idzhar Nurcahyo	<p>Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi jika diuji dengan teori implementasi Merilee S. Grindle belum</p>

	<p>KEMISKINAN DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI</p>	<p>optimal dikarenakan pada indikator sumber daya dan pelaksana program. Faktor pendukung yang ditemui adalah peraturan yang jelas akan memberikan gambaran yang jelas bagi stakeholders dan Partisipasi pelaksana program komitmen pelaksana program dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Faktor penghambat yang ditemui adalah lambatnya penjangkaran masyarakat miskin, mesin edc sering mengalami gangguan dikarenakan terlalu sering melakukan transaksi, dan pin dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terblokir. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat yaitu sosialisasi kepada pihak desa/kelurahan untuk terus melakukan pendataan rutin berkala, Pengecekan dan perbaikan secara rutin</p>
--	---	--

			mesin edc, dan Melaporkan kepada pihak bank untuk perbaikan dan melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
18.	IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SUNGAI LANGKAI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM 2020	Mona Anggraini , Edison , Nazaki	Implementasi program BPNT di Kelurahan Sungai Langkai Bertujuan Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM berlum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari keberhasilan Implementasi program menurut Edward III dan indikator kinerja program BPNT yaitu tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat administrasi,

			yang masih belum berjalan sesuai dengan pedoman umum.
19.	IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA DUREN KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG	TITIS SRIMURNI, MILLATUS SHOLIAH	Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Namun ada juga beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lancar dalam penerimaan bantuannya dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Pemantauan Program Indikator pemantauan program belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat tidak meratanya kegiatan pemantauan

			<p>program yang dilakukan petugas. Bahkan ada KPM yang tidak mengetahui samasekali untuk melapor ke siapa. Dalam hal ini diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan dalam perbaikan program. Sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya</p>
--	--	--	--

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang yang telah di kemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung ?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung?
3. Bagaimana Peran kepala seksie kesejahteraan sosial melalui program bantuan pangan non tunai di kelurahan campaka, kecamatan andir, bandung ?

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di kemukakan, maka peneliti menentukan tujuan dan kegunaan penelitian ini yang di harapkan mampu memperoleh informasi dari pertanyaan penelitian dengan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Campaka. Kecamatan Andir Bandung
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung
3. Untuk mendeskripsikan peran kepala kesejahteraan sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Bandung

1.2.2 Kegunaan Penelitan

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis yaitu memberikan analisis ilmiah mengenai implemantasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat Miskindi kelurahan Campaka kecamatan Andir kota Bandung yang dapat di jadikan pedoman penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yaitu hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan pengalaman bagi penulis dan masyarakat atau Lembaga Dinas Sosial yang dapat menyesuaikan diri di lingkungan mana pun berada.